Women in Migration Network

ONLINE WEBINAR

Migrasi, Pemindahan, dan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Barat dan Asia Pasifik:

Krisis Iklim dan Dampaknya terhadap Mata Pencaharian Perempuan

19 Januari 2023

Laporan Singkat

Women In Migration Network

womeninmigration.org

Migrasi, Pemindahan, dan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Barat dan Asia Pasifik: Krisis Iklim dan Dampaknya terhadap Mata Pencaharian Perempuan

Pendahuluan dan Gambaran Umum

Women in Migration Network (WIMN), dengan dukungan dari Solidarity Center, menyelenggarakan acara virtual, *Migration, Displacement and Human Rights in West Asia and Asia Pacific regions: the Climate Crisis and its Impact on Women's Livelihoods* pada 19 Januari 2023.

Seminar daring tersebut melengkapi acara paralel WIMN, *"Migration, displacement and women's human rights in the climate crisis,"* yang diadakan tahun lalu selama Komisi PBB untuk Status Perempuan (CSW66). Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian dialog regional dan internasional WIMN, *Bridging Migration and Gender: Building More Powerful Movements,* didukung oleh Robert Bosch Stiftung, yang berupaya mendorong pendekatan persimpangan feminis untuk mengurangi ketidaksetaraan. Seminar daring ini berfokus pada wilayah Asia Barat dan Asia Pasifik yang karena masalah zona waktu belum dapat berpartisipasi penuh dalam acara 2022.

Kedua seminar daring diselenggarakan sebagai bagian dari kerja WIMN untuk mengembangkan analisis feminis tentang migrasi dan perubahan iklim—mengatasi penyimpangan, masalah struktural, dan dampak nyata serta perbedaan dalam analisis dan kebijakan. Hubungan gender, iklim, dan migrasi ini sendiri merupakan elemen penting dalam upaya WIMN untuk membangun Kebijakan Migrasi Feminis yang digerakkan secara kolektif.

Acara bulan Januari ini melibatkan peserta dari organisasi internasional, regional dan lokal, donor global dan regional, media regional, pemerintah, dan akademisi dari berbagai universitas. Interpretasi simultan dalam bahasa Arab, Bahasa dan Tagalog disediakan selama seminar daring – upaya untuk menyeimbangkan kesenjangan kekuatan yang juga ada di tingkat linguistik. Perekaman video hanya tersedia dalam bahasa Inggris karena keterbatasan teknis.

Dengan memanfaatkan anggota, sekutu, dan kontak lainnya, WIMN mengumpulkan pembicara dari kawasan Asia Barat dan Asia Pasifik. Percakapan mereka mengeksplorasi bagaimana perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrem berdampak pada penghidupan perempuan dan bagaimana dampak tersebut dapat menyebabkan perpindahan dan/atau migrasi.

Aya Ibrahim, seorang peneliti di Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat (ESCWA), berbicara tentang dampak perubahan iklim di kawasan Arab, termasuk contoh Asia Barat. Dia berfokus pada mata pencaharian (dalam kaitannya dengan dampak seperti peningkatan suhu, kekurangan air, produktivitas pertanian) dan

menjelaskan bagaimana peristiwa cuaca ekstrem dan perubahan pola iklim terkait dengan migrasi dan pemindahan.

Panel pemimpin perempuan kemudian berbicara tentang tantangan utama yang dihadapi perempuan akibat krisis iklim dan pengalaman mereka dalam mengatur dan menanggapi tantangan tersebut. Panelis termasuk Aydah Akao, Koordinator Jaringan Masyarakat Adat di Kepulauan Solomon (NIPS); Editha Barrientos, Perwakilan Sandigan Bahrain; dan Triana K. Wardani, Sekretaris Jenderal SERUNI - Serikat Perempuan Indonesia.

Para panelis menyimpulkan dengan membagikan tuntutan kebijakan utama sebagai masukan awal menuju platform advokasi kolektif.

Sorotan seminar daring

- **Perubahan iklim memengaruhi sumber daya dasar negara mana pun, terutama makanan dan air bersih, dan memicu perpindahan.**

  Badai dahsyat, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan berdampak besar pada produksi pertanian dan perikanan, sumber utama pendapatan dan mata pencaharian bagi perempuan di banyak daerah.

  Panelis menyoroti bagaimana konsekuensi spesifik dari pemanasan global (suhu yang lebih panas, badai dan kekeringan yang lebih parah, lautan naik, dan lainnya) memengaruhi kehidupan manusia. Misalnya, kenaikan permukaan laut memaksa orang untuk pindah karena mereka kehilangan rumah dan lahan yang mereka gunakan untuk berkebun, yang memengaruhi ketahanan pangan dan mata pencaharian. Situasi-situasi ini, bersama dengan kurangnya layanan untuk memperbaiki dampak-dampaknya, memicu pengungsian dan tidak hanya hilangnya rumah, tetapi juga warisan dan tradisi.

- **Perempuan memimpin pelaksanaan kegiatan untuk melindungi lingkungan dan kehidupan mereka.**

  Panelis berbagi contoh strategi yang dipimpin oleh perempuan terorganisir untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang menghancurkan:
  - melestarikan dan memulihkan hutan
  - mendokumentasikan tantangan dan berpikir secara kolektif tentang masa depan
  - meningkatkan kesadaran
  - mengembangkan cara baru untuk mengawetkan makanan dan mengumpulkan air, antara lain

  Pekerjaan dengan masyarakat sangat terfokus pada mitigasi dan adaptasi dan untuk membangun ketahanan, memperkuat masyarakat dan berada di garis depan melawan perubahan iklim.

Kalau kita bisa beradaptasi, pola migrasi bisa berkurang, komentar Triana K. Wardani. Pertanian organik kolektif, bagian dari gerakan agro-ekologi yang lebih luas, adalah salah satu strategi ketahanan masyarakat yang juga membantu mengurangi penyebab perubahan iklim dan beradaptasi dengan konsekuensinya.

Aya Ibrahim menyebutkan pemerintah Lebanon mempertimbangkan peran perempuan dalam menghadapi perubahan iklim. Komunikasi nasional baru-baru ini tentang penerapan Perjanjian Paris menekankan pentingnya peran perempuan dan memasukkan analisis gender yang menilai peran perempuan dalam berbagai aspek tata kelola, kebijakan dan proses perencanaan terkait perubahan iklim.

- **Data berbasis bukti adalah kunci untuk memahami dampak perubahan iklim dan untuk mengembangkan kebijakan dan kampanye advokasi yang efektif.**

Pemanasan global dan perubahan iklim berada di belakang apa yang disebut "bencana alam" . Para panelis berbagi bagaimana informasi berkualitas diperlukan untuk dampak yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perencanaan yang lebih baik dan respons yang lebih akurat, sekaligus meningkatkan kesadaran.
Inisiatif Regional untuk Penilaian
Dampak Perubahan Iklim pada Sumber Daya Air dan Kerentanan Sosial-Ekonomi di Wilayah Arab (RICCAR) dipresentasikan selama seminar daring. Ini adalah inisiatif regional untuk menilai dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air tawar di wilayah Arab dan untuk memeriksa implikasi kerentanan sosial ekonomi dan lingkungan berdasarkan kekhususan wilayah.

- **Pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, mengatur, dan mencegah salah tafsir dan penyalahgunaan.**

Informasi yang berkualitas dan dapat diakses sangat penting untuk memperkuat pengorganisasian dan advokasi komunitas swadaya dalam pengurangan risiko bencana, membangun ketahanan dan tindakan lain untuk mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk mengamankan hak asasi manusia dan perlindungan, dan melawan pelanggaran dari pemangku kepentingan lainnya.

Triana K. Wardani mengkritik pemanfaatan program adaptasi dan mitigasi yang mendatangkan investasi asing dan utang untuk kepentingan segelintir kelas penguasa. Dia menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia mengalihkan subsidi yang dimaksudkan untuk mengurangi energi fosil untuk memberikan subsidi yang cukup besar bagi orang kaya untuk membeli mobil listrik.

- **Pemerintah negara-negara Global Selatan, yang ditindas oleh kolonialisme dan hubungan kekuatan global saat ini, menanggung konsekuensi negatif dari perubahan iklim. Sangat penting bahwa negara-negara Global Utara, yang menjadi kaya melalui kolonialisme dan neo-kolonialisme, menanggung biaya krisis iklim.**

Sementara populasi dari Global South adalah yang bertahan dari krisis lingkungan terburuk, negara-negara terkaya di dunia bertanggung jawab atas 80% emisi karbon, penyumbang utama perubahan iklim. Negara-negara yang lebih kaya harus menanggung sebagian besar biaya dan konsekuensi dari krisis iklim.

Pada tahun 2009, pada konferensi iklim COP15 di Kopenhagen, ekonomi berpenghasilan tinggi berjanji untuk memobilisasi total $100 miliar per tahun untuk mendanai proyek adaptasi dan mitigasi pada tahun 2020. Pada tahun 2015, ketika negara-negara menandatangani Perjanjian Paris, mereka berkomitmen untuk mencapai keseimbangan antara mitigasi dan adaptasi, dan mengusulkan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda dan kemampuan masing-masing, yang pada kenyataannya terus merusak dukungan keuangan untuk negara-negara miskin yang terkena dampak iklim. Mengikuti kerja advokasi dari banyak organisasi masyarakat sipil dan atas desakan khusus negara pulau kecil, COP27 (2022) setuju untuk memperluas pembiayaan untuk menutupi kerugian dan kerusakan juga. Masih harus dilihat bagaimana dana tersebut akan bekerja dan apakah dukungan akan menjangkau populasi yang terkena dampak.

Para panelis menyoroti bahwa dalam beberapa kasus ada undang-undang dan rencana aksi, tetapi penerapannya merupakan tantangan.
Seperti yang disebutkan Aydah Akao, Kepulauan Solomon memiliki undang-undang khusus untuk Pengurangan Risiko Bencana (DDR) tetapi Kementerian yang bertanggung jawab tidak memiliki kapasitas (terutama sumber daya manusia) untuk menerapkannya. Dalam kasus lain, tidak ada komitmen yang terlihat dan tanggapan pemerintah tidak cukup dan tidak memadai. Triana K. Wardani menyatakan, proyek-proyek adaptasi dan mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia belum mulai mengatasi dampak kerugian dan kerusakan yang dialami masyarakat Indonesia secara utuh.

- **Aliansi sangat penting untuk menolak dan meminimalkan dampak krisis iklim**

Kita akan lebih kuat jika bekerja sama, kata Editha Barrientos dari Sandigan. Seminar daring adalah ruang untuk membangun pengetahuan untuk memahami bagaimana segala sesuatu terhubung dan kebutuhan untuk menggabungkan kekuatan. Perubahan iklim adalah isu global, dan tanggapannya memerlukan kerja sama global dan lintas sektor (hak pekerja dan migran, feminis, pembela lingkungan…) SERUNI di Indonesia mengorganisir perempuan yang bekerja di perkebunan dalam aliansi dengan pemuda, petani dan organisasi lainnya. Mereka bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan menuntut hak-hak mereka. Menurutnya, sangat penting untuk memperkuat komunitas di lapangan.

Menuju platform advokasi kolektif: Tuntutan kebijakan utama

Panelis diminta untuk mengembangkan pengalaman mereka dan menyoroti beberapa tuntutan kebijakan utama untuk disertakan dalam platform advokasi kolektif.

Sementara dampak gender dari perubahan iklim bersifat spesifik dan kontekstual, panelis berbagi bahwa banyak perempuan menghadapi situasi serupa dalam konteks

yang sangat berbeda ketika menghadapi dampak tersebut. Perjuangan bersama ini dan tuntutan kebijakan selanjutnya berguna untuk membangun kolaborasi, meski tetap menghargai nuansa lokal. Panelis mendesak:

- Perempuan dan masyarakat secara lebih umum, harus diberi kompensasi atas kerugian akibat bencana terkait perubahan iklim.
- Rencana dan kebijakan adaptasi harus dilaksanakan di berbagai sektor dan di berbagai tingkatan. Ini termasuk pelatihan pekerjaan dan keterampilan serta dukungan keuangan langsung kepada orang-orang yang terkena dampak untuk memastikan bahwa meskipun migrasi mungkin menjadi pilihan, itu bukan satu-satunya untuk keselamatan dan kelangsungan hidup.
- Jika migrasi diperlukan, kebijakan pendukung harus memastikan hak-hak migran dalam transit dan di negara tujuan, termasuk perlindungan warisan dan praktik budaya, dan perhatian khusus pada kebutuhan dan hak perempuan.
- Berbagai sektor dan kelompok yang terkena dampak kebijakan tentang pengungsian dan krisis iklim harus menjadi bagian dari desain dan implementasinya – tentu saja, perempuan, tetapi juga pekerja, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Misalnya, kebijakan tersebut harus memiliki indikator untuk mengukur integrasi perempuan dalam kebijakan sektoral seperti energi, air, dan pengelolaan limbah. Kebijakan inklusif harus mengarah pada implementasi yang lebih lancar dan lebih efektif.
- Kebijakan iklim harus dirumuskan berdasarkan data ilmiah dan memasukkan kerangka hukum berbasis hak dan tanggap gender, khususnya di bidang pelayanan publik.
- Diperlukan lebih banyak kolaborasi dan kemitraan dengan LSM lokal dan berbasis masyarakat, termasuk pekerjaan garis depan melawan perubahan iklim dan tuntutan akuntabilitas oleh perusahaan transnasional.
- Pemerintah daerah harus memetakan organisasi yang bekerja pada mitigasi dan adaptasi iklim dan melibatkan mereka dalam perancangan dan implementasi kebijakan.

_ _ _ _

WIMN mengapresiasi partisipasi semua pihak dalam seminar daring ini, dan berterima kasih atas dukungan dan kerja sama yang murah hati dari Solidarity Center. Seminar daring ini merupakan bagian dari upaya WIMN yang sedang berjalan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang interkoneksi migrasi dan perubahan iklim dari perspektif feminis, termasuk identifikasi titik konvergensi atau ketidaksepakatan lintas sektor dan wilayah.

WIMN bertujuan untuk menciptakan platform advokasi mobilitas kolektif dan feminis dari bawah ke atas yang dapat dimiliki oleh anggota dan sekutu serta digunakan di berbagai ruang kebijakan; kami akan mengadakan ruang lintas sektoral untuk memperluas diskusi kami.